

PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMEGANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh
RUSTAM
NIM. 10200107070

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 September 2011

Penyusun,

RUSTAM
NIM. 10200107070


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Rustam, NIM: 102001017070, mahasiswa Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 11 Agustus 2011

Pembimbing I



Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag
NIP. 19710402 200003 1 002

Pembimbing II



Drs. M. Thahir Maloko, M.HI
NIP. 19631231 199503 1 006

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang di susun oleh saudara Rustam NIM: 10200107070, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 25 Agustus 2011 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1432 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Islam, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 06 September 2011 M
06 Syawal 1432 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Muhammad Sabir, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan do'a yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Ibrahim Mustafa** dan Ibunda **Siti Aminah** tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan iringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Sabri AR., M.Ag selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Thahir Maloko., M.Hi selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs.Mukhtar Luthfi., M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Rahmawati Muin S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
6. Bapak Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

8. Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh stafnya dan karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang di pergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh dosen pada UIN Alauddin Makassar terima kasih atas bantuan dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah.
10. Saudara-saudaraku Wahyudin, Ishaka, Nani, Nurhidayah dan Masyita yang selalu ada di saat saya susah. Senyummu yang tulus membawaku kedamaian. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat.
11. Terima kasih kepada teman-teman kajian Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai (IM3), Himpunan Mahasiswa Muslim (HMM) Lambaledah yang telah memberikan saya banyak pengetahuan dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Iskandar, Jufri, Hartati, Maron dan Abdal yang telah banyak membantu saya berupa saran-saran dan dipinjamkannya laptop, sehingga skripsi ini bisa selesai.
13. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebut satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada kalian diucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Wassalam

Makassar, 06 September 2011

Penulis,

RUSTAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Dan Rumusah Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Pengertian Judul	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
H. Gambaran Besar Isi Skripsi.....	10
BAB II. KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	12
B. Beberapa Ketentuan Hukum Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	19
C. Rukun dan Syarat Sah Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	23
D. Status dan Jenis Barang Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	28
E. Subjek dan Objek Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	31
F. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai (<i>Ar-rahn</i>)	32
BAB III. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI	
A. Ulama Hanafiyah	34
B. Ulama Syafi'iyah	37

C. Landasan Pemikiran Mereka.....	38
BAB IV. IMPLIKASI EKONOMIS PEMANFAATAN BARANG GADAI	
A. Dampak Positif Pemanfaatan Barang Gadai	50
B. Dampak Negatif Pemanfaatan Barang Gadai	52
C. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Membangun Ekonomi Syariah.....	55
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAKSI

Nama Penyusun : **Rustam**
NIM : 1020010707
Judul Skripsi : ***"Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam"***

Skripsi ini merupakan skripsi penelitian pustaka yang membahas masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, pandangan para ulama, dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai. Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis melakukan *library research* yakni dengan mengambil data-data dari literatur yang ada kemudian mengelolanya melalui metode deduksi, induksi, dan komparasi.

Gadai-menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasannya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur'an, hadist dan '*Ijma*'. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas seizin *rahin* karena *rahin* adalah pemilik sah dari *marhun*. *Marhun* bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh *murtahin*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal.

Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai jaminan. Akan tetapi sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Karena itu, banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank disana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang lebih rumit.

Sebagai investasi bisnis lembaga keuangan seperti pegadaian tentu tidak lepas dari motif laba karena tujuan memaksimalkan laba inilah, maka banyak

lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bunga.¹ Bunga itu sangat membebankan masyarakat karena terkadang beban bunga yang harus nasabah bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Karena hal itu masyarakat ingin ada pendirian lembaga pegadaian syari'ah. Keinginan masyarakat terhadap berdirinya pegadaian syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga pegadaian perusahaan yang benar-benar menerapkan syariat Islam.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *ar rahn* atau *ar rahnu*. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”...³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 76.

² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam, 2005), h. 246.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 71.

Sedangkan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia dalam pelaksanaannya penggadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang gadaianya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga untuk membayar uang atas sejumlah barang yang menjadi gadaianya. Meskipun dalam prakteknya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan sistem syari'ah dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional.

Demikian pula dalam sistem pergadaian yang diadakan oleh Perum Pegadaian di Indonesia selayaknya dalam praktek gadai harus mengikuti cara-cara yang lebih *syar'iyah*. Terutama ketika barang gadaian belum dapat ditebus oleh penggadai (pemilik barang gadaian) yang digadaikan kepada Perum Pegadaian tidak serta merta melelang barang gadaian ketika penggadai belum dapat menebus barang gadaianya. Karena hal ini akan menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai, dan akan menimbulkan keuntungan yang banyak bagi pemegang gadai.

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Adapun alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi karena penulis ingin mengetahui kebenaran hukum-hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam?.

Dengan merujuk kepada pokok permasalahan maka penulis membagi dalam 3 sub pembahasan:

1. Bagaimana pemanfaatan gadai dalam sistem hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai?
3. Bagaimana implikasi ekonomisnya dari pemanfaatan barang gadai oleh pegang gadai?

C. Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang dibahas sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam ada pada pemberi gadai (*ar-rah*), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (*ar-rah*) tersebut dalam hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

2. Pandangan para ulama tentang barang gadai yang dimanfaatkan yaitu pada umumnya ulama membolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Gadai syari'ah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih jauh dari sistem ekonomi konvensional yang sangat berkembang pesat. Tetapi setidaknya ada usaha-usaha untuk menjalankan gadai syari'ah tersebut sebagai alternatif keluar dari masalah-masalah yang dialami masyarakat.

D. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*” untuk memahami secara komprehensif, utuh dan bermakna, maka perlu dijelaskan pengertian judul tersebut secara baik tak berlebihan kiranya apabila beberapa istilah pokok dalam judul skripsi ini dijelaskan satu persatu.

1. Barang adalah sesuatu yang dijadikan jaminan dalam gadai.
2. Gadai (*ar-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴
3. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

⁵ Erhans Anggawirya, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Indah Surabaya, 1995), h. 137.

4. Perspektif adalah sudut pandang terhadap sesuatu yang menjadi objek, cara melukiskan sesuatu atau pandangan dari sudut tertentu yang menjadi ukuran. Perspektif yang dimaksud penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai secara umum.⁶
5. Ekonomi adalah asas-asas mengenai produksi distribusi konsumsi yang saling berkaitan. Maksud dari penulis adalah sistem yang bersumber dari agama Islam yang diimplementasikan dalam satu sistem ekonomi.⁷
6. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui Allah SWT.⁸

Secara operasional maksud dari judul "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*", adalah untuk mengetahui hukum barang gadai apabila dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sehingga tidak terjadi kontraversi dalam pelaksanaannya.

E. Tinjauan Pustaka

Boleh dikata sangat jarang literatur-literatur ekonomi umum maupun khusus ekonomi Islam yang membahas gadai (*ar-rahn*). Oleh karena itu, minimal

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II. Jakarta: Gema Isani, 2005), h.117.

⁷ *Ibid.*, h. 220.

⁸ *Ibid.*, h. 340.

mengungkapkan dan mengkaji bagaimana praktek gadai (*ar-rahn*) di Indonesia dan bagaimana konsepsi ekonomi Islam tentang gadai (*ar-rahn*).

Buku *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, ditulis Kasmir, SE., MM (2005) mengupas perkembangan gadai (*ar-rahn*) di Indonesia, mekanisme gadai (*ar-rahn*) dan mengkaji secara teknik-teknik pembiayaan gadai (*ar-rahn*) dalam ekonomi konvensional di Indonesia.

Buku, *Bank Syari'ah "dari Teori ke Praktek"* yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001) yang mengkaji gadai (*ar-rahn*) berdasarkan landasan syari'ah yang diterapkan dalam ekonomi Islam.

Buku yang ditulis oleh Zainuddin Ali yang mengupas tentang hukum gadai syari'ah, pengertian gadai, dasar hukum, serta mekanisme dalam gadai syari'ah.

Buku, *Fiqhi Muamalah* karangan Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA dalam buku tersebut tentang gadai (*rahn*) dan hukum *rahn* dan dampaknya, perbedaan antara *rahim* dan *murtahin* serta berakhir *rahn* (waktu berakhirnya *rahn*).

Buku *Bank dan Lembaga keuangan Syariah* yang ditulis oleh Andri Soemitra, M.A. mengupas tentang sistem lembaga-lembaga keuangan dalam Islam termasuk gadai (*ar-rahn*) yang diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah yaitu bank syari'ah.

Buku *Teori Ekonomi dalam Islam* yang ditulis oleh Masyuri yang mengupas tentang teori ekonomi Islam, landasan filosofis, sistem moneter, fiskal, dan implementasi ekonomi Islam dalam perdagangan.

Selain buku-buku di atas, penulis juga mengambil literatur-literatur lain yang berhubungan terhadap pokok-pokok pembahasan skripsi ini dan diharapkan mampu membantu keautentikan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan naskah skripsi ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan syari'i yaitu suatu pendekatan yang pada ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap pokok pembahasan ini.
- b. Pendekatan ekonomi yaitu suatu pendekatan dengan jalan memperhatikan gejala-gejala ekonomi ataupun sistem ekonomi.
- c. Pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan jalan memperhatikan dan mempelajari gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat guna mendukung keotentikan pembahasan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Dengan penelitian melalui kepustakaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan perekonomian Islam, sumber-sumber penunjang yang lain diantaranya tafsir Al-Qur'an, buku-buku yang berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional,

dan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dimana dalam kutipan ini dipergunakan dua macam kutipan yakni:

- a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur-literatur tanpa ada perubahan sedikitpun, baik dari segi redaksi maupun tidak mengurangi maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau alasan dari berbagai sumber bacaan, yang kemudian bahasa dan redaksi kalimatnya agak berbeda namun tidak mengurangi makna dari tulisan tersebut.

3. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan tiga macam. Sebab data yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, karenanya untuk mencapai apa yang diinginkan, maka penulis mengolah data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan dalam skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan dalam pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Metode induktif, menganalisa data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu penganalisaan data yang didasarkan dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yaitu setiap data yang bersifat khusus dan bersifat umum, selanjutnya dibandingkan antara keduanya, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pemanfaatan barang gadai dalam sistem hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai.
- c. Untuk mengetahui implikasi ekonomisnya dari pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai.

2. Kegunaan

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri penulis, agama, bangsa dan Negara.
- b. Diharapkan dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.

H. Garis Besar Isi Skripsi

Secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I adalah bab yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penulisan serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II adalah bab yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum gadai (*ar-rahn*), ketentuan hukum gadai, rukun dan syarat sah gadai, status dan

jenis barang gadai, subjek dan objek gadai, serta hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.

Bab III adalah bab yang menjelaskan tentang pandangan para ulama terhadap pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai serta landasan pemikiran mereka.

Bab IV adalah bab yang membahas tentang implikasi ekonomisnya pemanfaatan barang gadai.

Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan dari isi skripsi dan juga memuat beberapa penulis.

BAB II

KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (Ar-rahn).*

1. Penegertian Gadai

Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹ Kalimat *Rahn* (gadaian) itu menurut *lughat* artinya “tetap”. Ada yang mengatakan “menahan”.² Kalimat *rahn* juga terdapat di dalam firman Allah Q.S Al-Muddatsir (74): 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”³

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

² Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhaisaini, *Kifayatul Ahyar* (Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995), h. 584.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 995.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 156-157.

Sedangkan menurut istilah *syara'*: ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.⁶

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulakan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk

⁵Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Cet. I; Surabaya: 1995), h. 161.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).⁷

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:⁸

- a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Sesuatu yang bernilai karena (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

- d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

- e. Muhammad Syafi'i Antoni

Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhum bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 383.

⁸ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 2-3.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹⁰

Menurut Ahmad Beraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi menurutnya, uang hasil gadai syari'ah ini tak boleh dipakai untuk investasi.¹¹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta

¹⁰ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

¹¹ *Ibid.*

benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.¹²

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadist dan 'Ijma' ulama.

Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

1) Al-Quran.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³

¹² Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 3.

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 71.

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihaburkan tanpa ada manfaat.

Sekelompok *fuqaha* berpegang pada *dhahir* ayat tersebut, yakni *mujahid*, dan golongan *dhahiriyah*, bahwa gadai-mengadai tidak disyari'atkan kecuali dalam perjalanan (*safar*). Tetapi jumhur *fuqaha* membolehkan gadai-mengadai baik dalam keada'an *safar* maupun dalam keadaan mukim.¹⁴

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara membandingkan sebuah barang kepada orang yang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*). Dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 217.

kemudahan dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari melakukan transaksi utang-piutang.¹⁵

2) Hadist.

Selain ayat di atas, juga terdapat hadist yang menjadi dasar hukum yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadist Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعما من يهودي الى
أجل ورهنه درعا من حديد

Artinya:

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju besi.”¹⁶ (HR. Muslim).

- b. Hadist dari anas, yang berbunyi:

عن انس رضي الله رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا يهودي بالمدينة و أخذ
منه شعير المأهله

Artinya:

Anas r.a. berkata, “Rasulullah pernah mengadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau”.¹⁷ (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

¹⁵ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 6.

¹⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al-Fikr, 1993), h. 51.

¹⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunnan Ibn Majah* (Dar Al-Fikr, 1995, h. 18).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.¹⁸

3) '*Ijma*' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad saw. ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mau mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.¹⁹

B. Beberapa Ketentuan Hukum Rahn.

Adapun beberapa ketentuan hukum rahn, yakni sebagai berikut:

1. Barang yang digadai harus berada di bawah tangan (kekuasaan) *murtahin* (penerima gadaian) dan bukan ditangan *rahin* (orang yang menggadaikan). Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan jika *murtahin* mengembalikannya atas kehendaknya sendiri, maka itu adalah haknya.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.

¹⁹ *Ibid.*

2. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap jadi tanggungan, meskipun tanaman buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.
3. Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadai harus di kembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasinya, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.
4. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab apapun, dan hutang masih tetap tanggungan *rahin*.
5. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bisa dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.
6. Jika *rahin* mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penembusannya (pembayaran hutang), maka akad *rahn* dihukumi batal

(tidak sah). Begitu juga akad *rahn* dihukumi tidak sah jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan mengatakan, “jika hutang telah jatuh dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milik”.

7. Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah hutang, maka pendapat *rahin* dengan memintanya supaya jika bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti. Sedang jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai barang gadaian, dimana *rahin* mengatakan, “Aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya.” Kemudian *murtahin* menyangkal, dan berkata, “Hanya binatang betina saja”. Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima ialah pendapat *murtahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa membuktikan tuduhannya.
8. Jika *murtahin* mengaku bahwa ia telah mengembalikan *rahn* (barang gadaian), akan tetapi *rahin* menyangkalnya, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapatnya *rahin* dengan bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukan bukti yang menguatkan pengakuannya.
9. *Murtahin* diperbolehkan menaiki *rahn* (barang gadaian) yang dapat dinaiki serta memerah *rahn* yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil (yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara *rahn*), dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Saw:

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا و لبن الد ر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
وعلي الذي يركب ويسرب نفقته

Artinya:

“Punggung binatang dapat dinaiki dengan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian dan air susunya dapat diperah dengan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian. Bagi orang yang menaikinya dan pemerah air susunya wajib mengeluarkan biayanya”.²⁰ (HR. Al-Bukhari)

10. Hasil dari *rahn* (barang gadian) itu seperti *ijarah*, dimana hasilnya, keturunan dan lain-lain adalah milik *rahin*. Sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya *rahn* tetap terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*Rahn (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya*”.
11. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadai tanpa meminta izin pada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta ganti pada *rahin*. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada *rahin* itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada *rahin*, karena jika seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak sepatasnya meminta ganti rugi atas amal yang di kerjakannya.
12. Jika rumah yang digadaikan itu ambruk, lalu *murtahin* memperbaikinya tanpa meminta izin dahulu kepada *rahin*, maka tidak menjadi masalah

²⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1983), h. 116.

baginya meminta ganti kepada *rahin* kecuali bahan-bahan bangunan, seperti: kayu atau batu yang susah dicopot, maka *rahin* harus menggantinya tanpa diminta oleh *murtahin*.

13. Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian dari pada sejumlah pemberi hutang lainnya. Sehingga saat pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya.²¹

C. *Rukun dan Syarat Sah Gadai (Ar-rahn)*

1. Rukun Gadai

Rukun-rukun gadai meliputi:

- a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:
 - 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
 - 2) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu:
 - 1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).
 - 2) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diakadkan gadai).
- c. *Shigat* ('aqad gadai). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²²

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI; Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H), h. 595-598.

²² Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 615.

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:²³

- 1) *Shigat* (*Lafadz, ijab dan qabul*).
- 2) Orang yang beraqad (*rahin dan murtahin*).
- 3) Harta yang dijadikan *marhun*.
- 4) Utang (*marhun bih*).

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai rukun gadai di antaranya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

▪ **Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah)**

Mereka berkata: *Rahnun* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*. Kerena dia itulah hakekat dari pada akad. Sedang lainnya termasuk barang yang di luar hakekat akad, sebagaimana keterangan terdahulu.²⁴

▪ **Mazhab Maliki (Al-Malikiyyah)**

Mereka berkata: Syarat *Rahnun* itu terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Bagian yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad, yakni *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadaian).
- b. Bagian yang berkaitan dengan *marhun*, yakni barang yang digadaikan.

²³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 42.

²⁴ Moh. Zuhri., *loc.cit.*

- c. Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih*, yakni hutang yang karenanya diadakan gadai.
- d. Bagian yang berkaitan dengan akad.²⁵

2. Syarat Sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

- a. Berakal.
- b. Baliqh.
- c. Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.²⁶

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat gadai ini, yaitu:

▪ Mazhab Maliki

Syarat gadai yang pertama: bahwa tiap-tiap orang yang akad jual belinya sah adalah sah pula gadainya. Tiap-tiap orang yang akad jual belinya tetap (mengikat), mengikat pula akad gadainya. Oleh sebab itu untuk sahnya gadai, disyaratkan *rahn* (orang yang menggadaikan) sudah *tamyiz*. Karenanya tidak sah gadai dari orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz*. Adapun jika tergadainya anak kecil yang sudah *tamyiz* atau orang bodoh dan sesamanya maka akad gadai mereka adalah sah tetapi tidak tetap (mengikat) kecuali bila telah diijinkan

²⁵ *Ibid.*, h. 615-616.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 141.

walinya. Bagian yang kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan), maka barang yang sah diperjual belikan, sah pula digadaikan dan sebaliknya.²⁷

Bagian ketiga, yaitu syarat gadai yang berkaitan dengan hutang yang karenanya diadakan gadai. Bagian yang keempat, yakni syarat sahnya akad gadai yang berkaitan dengan akad. Yaitu hendaknya dalam akad gadai tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad gadai itu sendiri.²⁸

▪ **Mazhab Hanafi**

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas tiga, yaitu:²⁹

1. Syarat terjadinya akad *rahn*, yakni *marhun* (barang gadai) yang berupa harta benda dan *marhun bih* (hutang) yang berupa sebab terjadinya gadai.
2. Syarat sahnya akad *rahn*, yaitu :
 - a. Hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal.
 - b. Tidak disandarkan pada waktu tertentu.
 - c. *Marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya.
 - d. *Marhun* (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima oleh gadai setelah diterima olehnya.
 - e. *Marhun* (barang gadai) bukanlah barang yang najis.
 - f. *Marhun* (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.

²⁷ *Ibid.*, h. 616 - 617.

²⁸ *Ibid.*, h. 621- 622.

²⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 24.

3. Syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap bilamana *marhun* (barang gadai) diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *izab* dan *qabul*.

▪ **Mazhab Maliki dan Imam Syafi'i**

Pendapat ulama mazhab Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka, barang- barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada umumnya, baik ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian mejadi batal.³⁰

³⁰ *Ibid.*, h. 24-25.

D. Status dan Jenis Barang Gadai (Ar-rahn).

1. Status Barang Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan (*rahin*).
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan.³¹

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditur*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasi oleh kreditur maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang

³¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 474-475.

penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.³²

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dan Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.³³

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.³⁴

2. Jenis Barang Gadai

³² Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 25.

³³ *Ibid.*, h. 25-26.

³⁴ *Ibid.*, h. 26.

Jenis barang gadai adalah (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.³⁵

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*. Barang-barang tersebut antara lain:

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, vidio player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.³⁶

Menurut kesepakatan ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Heri Sudarsono, *op.cit.*,h. 172.

kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.³⁷

E. Subjek dan Objek Gadai.

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgaver*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Rahin* atau pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemeberi gadai, yaitu:

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang.³⁸

Penerima gadai (*pandgever*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.³⁹

Objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak

³⁷ Zainuddin Ali, *loc. Cit.*

³⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 36.

³⁹ *Ibid.*

berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

F. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai (*Ar-rah*n).

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *loc.cit*.

- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima gadai diketahui manyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya lainnya.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

BAB III

PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.¹

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang gadai tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharannya. Hal ini dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).²

Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa pegadaian boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil

¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 59.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.

manfaat barangnya. Dan itu bukan riba, karena memanfaatkan barang gadai itu ditarik/diperoleh melalui izin, bukan ditarik oleh pinjaman.³

Mahmud Syaltat dapat menyetujui pendapat ulama Hanafi tersebut di atas dengan catatan: izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus, ikhlas berdasarkan *mutual understanding* dan *mutual help* (saling mengerti dan saling menolong).⁴

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai itu tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengambil manfaat adalah riba, kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁵

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan diatas, mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, Zainuddin Ali mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum gadai yang dikemukakan oleh para ulama yaitu dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang gadai tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, *rahin* bila ingin memanfaatkan *marhun* berada pada

³ Masjfuk Zuhdi, *Musail Fiqiyah* (Cet. IV; Jakarta: CV. Haj, 1993), h. 118.

⁴ *Ibid.*

⁵ Zainuddin Ali, *loc.cit.*

murtahin selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. Pendapat Zainuddin Ali tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya di Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, empang, sawah, kebun, maupun yang lainnya.⁶

Adapun pendapat zumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila mengenai pemanfaatan barang gadai terhadap barang yang tidak bergerak misalnya sawah, yakni bila ada seorang berhutang uang dengan menggadaikan sawahnya, maka sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya. Tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima gadai. Baik dari izin pemilik sawah atau pun tanpa seizinnya.⁷

Sedangkan menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiah hukumnya boleh. Selama ada izin dari pemilik harta yang digadaikan itu. Dan kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Hanafiah, maka sistem gadai sawah seperti ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya, atau menjadi batal saat pihak pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap.⁸ Dengan demikian intinya adalah bahwa ada ulama yang membolehkan sawah itu untuk digarap pihak yang menggunakan, namun umumnya malah mengharamkannya.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas

⁶*Ibid.*, h. 44-45.

⁷Ahmad Sarwat, *Hukum Menggarap Gadai Sawah*, Walau Setitik. Blogspot. Com, 2011.

⁸ *Ibid.*

merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

B. Ulama Syafi'iyah.

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*.⁹

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.¹⁰

Oleh karena itu, barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.

Penggadai boleh mengambil manfaat barang gadai asal tidak mengurangi nilainya, seperti menempati rumah dan menaiki hewan tanpa seizin penerima gadai.

⁹ Sasli Rais., *op.cit.*, h. 54.

¹⁰ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 33.

Apabila dalam akad, penerima gadai mensyaratkan agar manfaat barang gadai kembali kepadanya, maka akadnya *fasid* (rusak) atas orang yang menggadaikannya. Tetapi menurut suatu pendapat (*qil*) : bahwa yang rusak adalah syaratnya, sedang akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana pun penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya barang gadai, bila ia mensyaratkan dalam akadnya. Sebaliknya apabila sebelum akad orang yang menggadaikan sudah memperkenankan kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat barang gadai yang akan digadaikan, maka penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai sesudah akad.¹¹

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama membolehkan pemanfaatan barang gadai. Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang.

C. Landasan Pemikiran Mereka.

1. Landasan Pemikiran Ulama Hanafiyah.

¹¹ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 641-642.

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.¹²

Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mangambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut;¹³

Pertama, Hadist Rasulullah Saw.:

عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: الرهن محلوب ومركوب

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw.bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”.¹⁴ (HR. Bukhari).

Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada dikekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.¹⁵

Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai

¹² Sasli Rais., *loc.cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1983), h. 116.

¹⁵ *Ibid.*

murtahin. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu; Apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhun* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat *rahin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *madharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*. Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *rahin*, ini pun sama *madharat*-nya, maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama Hanafiyah tersebut, menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhun* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada di bawah kekuasaannya.¹⁶

Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat *marhun* adalah hak *murtahin*. Pendapat ini didasarkan hadist Abu Hurairah yang mengatakan *marhun* dapat ditunggangi dan diperah susunya. Hadist tersebut diriwayatkan Daruquthny dan Hakim, serta mengaanggapnya *shahih*.¹⁷

Dalam menafsirkan hadits tersebut, Imam Bukhari memahami bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah *murtahin*. Hal ini

¹⁶ *Ibid.*, h. 59-60.

¹⁷ *Ibid.*, h. 61.

ditunjang oleh alasan yang kedua (dengan akal), yaitu karena *marhun* berada dalam kekuasaan *murtahin*. Karenanya, *murtahin* pula yang berhak mengambil manfaatnya.¹⁸

Selanjutnya Rahmad Syafi'i mengatakan bahwa hadist tersebut hanya dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan bagi yang lainnya tidak dapat di-*qiyas*-kan. Demikian juga dengan alasan kedua (dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yakni bahwa *marhun* itu sebagai kepercayaan bukan pemilikan, maka apabila membolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tersebut kepada *murtahin* berarti membolehkan mengambil manfaat *marhun* kepada yang bukan pemiliknya. Sedangkan yang demikian itu, dilarang oleh *syara'*.¹⁹

Imam Abu Hanifah juga tidak menyebutkan tentang hadist yang dijadikan alasan Jumhur Ulama yang mengatakan segala risiko keuntungan dari *marhun* adalah *rahin*. Mungkin hadist yang dimaksud tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah atau mungkin juga sampai, namun *perawi hadistnya* kurang terpercaya, sehingga Hanifah yang menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai menggadaikan tanah ataupun kebun, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang.

¹⁸ *Ibid.*, h. 62.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*

Sedangkan gadai-menggadai tanah itu tidak dapat di-*qiyasi*-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan, dan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah dan kebun termasuk kepada benda yang tidak bergerak.

Jadi gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual-beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat atas *marhun* berada pada pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* kecuali apabila diizinkan pihak *rahin*.

Adapun landasan ulama Hanafiyah yang beliau jadikan rujukan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

a) Al-kitab

Al-kitab adalah sumber pokok ajaran islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan Al-kitab, merinci yang masih bersifat umum (global), siapa yang tidak mau berpegang kepada As-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.²¹

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 188.

c) Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat)

Para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagungan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pengetahuan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

d) Al-Qiyas

Abu-Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada Nash yang ada setelah memperhatikan Illat yang sama antara keduanya.²²

e) Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas. Illatnya, untuk mengamalkan Qiyas yang samar Illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.²³

²² *Ibid.*, h. 189.

²³ *Ibid.*, h. 189-190.

f) 'Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dan Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak' atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilaksanakan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada 'Urf manusia.²⁴

2. Landasan Pemikiran Ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatupun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rahin* lah, yang mempunyai hak atas *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut.²⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* tersebut, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*.²⁶

²⁴ *Ibid.*, h. 193-194.

²⁵ Sasli Rais., *op.cit.*, h. 54.

²⁶ *Ibid.*

Alasan yang digunakan ulama As-Syafi'iyah adalah sebagai berikut:²⁷

Pertama, Hadist Nabi Saw. yang artinya:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه²⁸

*“Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah saw. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.*²⁹ (HR. Asy-Syafi’I dan Daruquthny).

Hadist tersebut, menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung segalanya.

Kedua, Hadist Nabi Saw. yang artinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: الرهن محلوب ومركوب³⁰

*“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah saw. yang artinya: ‘Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya’.*³¹ (HR. Al Hurairah)

²⁷ Ibid., h. 54-55.

²⁸ Asy-Syaukani, *Nail al-Autyahr* (Cet. IV; Beirut: Dahr al-Fkr), h. 264. Hadist riwayat Asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

²⁹ Zainuddin Ali., *op.cit.*, h. 42.

³⁰ Asy-Syaukani., *loc.cit.*

³¹ Zainuddi Ali., *op.cit.*, h. 43.

Berdasarkan hadist di atas, bahwa pihak yang berhak menunggangi dan memerah susu adalah *rahin*.

Dari hadist tersebut, maka ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian Asy-Syafi'i menjelaskan *tasarruf* yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewahkan *marhun*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkan sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.³²

Menurut ulama As-Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa pengambilan manfaat *marhun* adalah *rahin* dan *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat *marhun*, kecuali atas izin dari *rahin*. Mereka beralasan dari hadist Abu Hurairah. Hadist tersebut menegaskan bahwa *rahin* tetap tidak dapat tertutup dari manfaat *marhun*, kerugian dan keuntungannya adalah dipihak *rahin* itu sendiri. Hadist tersebut diriwayatkan juga oleh Halim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban pada kitab *sahihnya*, Abu Dawud dan al-Bazzar telah menganggapnya pula sebagai *hadist* yang *shahih*. Karena hadist itu *shahih*, maka sah dijadikan dalil. Hadist tersebut diperkuat lagi dengan hadist riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa “hewan seseorang

³² Sasli Rais., *loc.cit.*

tidak dapat diperah tanpa seizin pemiliknya”. Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dan shahih derajatnya.³³

Berdasarkan hadist tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat *marhun* adalah *rahin*, karena sebagaimana sudah dijelaskan bahwa *marhun* hanya merupakan kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Karenanya, *rahin* pemilik yang sah, maka *rahin* juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, kecuali dengan seizin *rahin*.³⁴

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Zainuddin Ali berpendapat bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.³⁵

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i sebagai acuan pendapatnya termasuk dalam kitabnya *Ar-Risalah* sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, h. 60.

³⁴ *Ibid.*, h. 60-61.

³⁵ Zainuddin Ali., *op.cit.*, h. 42.

a) Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.

b) As-Sunnah

Beliau mengambil sunnah, tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadist itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi saw.

c) Ijmak'

Dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, disamping itu beliau berpendapat dan menyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

d) Qiyas

Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.

Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyidik tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

e) Istidlal (istishhab).

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *islamologi* mengatakan bahwa istidlal makna aslinya, menarik kesimpulan suatu barang, dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dalam undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam.³⁶

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaedah-kaedah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: “Barang siapa yang menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syari'at tersendiri”.

³⁶ M. Ali Hasan., *op.cit.*, h. 211-212.

BAB IV

IMPLIKASI EKONOMIS PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Dampak Positif Pemanfaatan Barang Gadai.

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.¹

Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan.²

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat langsung dimanfaatkan oleh penggadai, dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh penggadai. Dan hal ini

¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 33.

² *Ibid.*

diperdebatkan dikalangan ulama, karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai.

Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama.³

Karenanya, mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa tanah dan sawah. Dimana, apabila tanah atau sawah tersebut digarap atau dikelola langsung oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya apabila tanah atau sawah tersebut tidak digarap atau dikelola oleh pihak penerima gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali.

Selanjutnya bahwa pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan *syara'* dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatanya. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan tanpa menghidupkan, maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan sawah dan ladang, apabila dibiarkan begitu saja tentunya akan membuat sawah tersebut sia-sia saja karena tidak mendatangkan

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

sesuatu hasil atau pendapatan disebabkan karena tidak dimanfaatkan, begitu pula dengan tanah, rumah dan sebagainya.⁴

Atas dasar hal di atas, maka kita tidak boleh begitu saja menganggap bahwa perbuatan mengambil manfaat terhadap barang gadai adalah sesuatu yang salah atau haram, karena tanpa kita sadari, hal tersebut ternyata juga mempunyai dampak yang positif.

Menurut Zainuddin Ali, bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai material dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁵

Jadi, berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai,⁶ sehingga secara tidak langsung hal tersebut membawa dampak yang positif bagi barang yang digadaikan.

B. Dampak Negatif Pemanfaatan Barang Gadai.

Sesuatu yang mempunyai dampak positif tentu juga mempunyai dampak yang negatif. Begitu pula dengan pemanfaatan barang gadai yang juga memiliki dampak yang negatif.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44-45.

⁵ *Ibid.*, h. 34.

⁶ *Ibid.*, h. 31-32.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah hal yang bertentangan dengan tujuan Syaria'at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi dimata masyarakat kita, bahwa terkadang pihak pemegang gadai terlalu berlebihan dalam memanfaatkan barang gadaian.

Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik.

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian sebab itu akan menyebabkan barang gadaian hilang atau rusak.⁷

Disamping itu, pihak pemegang gadai (*murtahin*) yang menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai (*marhun*), misalnya barang gadaian berupa sawah atau ladang, dimana *murtahin* mengambil seluruh hasil dari sawah tersebut tanpa membaginya kepada *rahin*, tentunya hal tersebut akan membuat si *rahin* merasa telah dirugikan, karena barang yang telah ia gadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari barang gadaian tersebut. Kemudian, contoh barang gadaian (*marhun*) yang mudah rusak apabila pemanfaatannya terlalu berlebihan yaitu

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 172.

seperti motor atau mobil. Apabila barang tersebut rusak juga akan membuat si *rahin* sangat merasa dirugikan.

Adapun jika hal di atas benar-benar terjadi, akan membawa dampak yang negatif masing-masing pihak yaitu antara *rahin* dan *muratahin*. Si *rahin* merasa dirugikan karena barangnya telah rusak, sementara tujuan *rahin* memasukan barangnya ke rumah pegadaian atau penerima gadai (*murtahin*), selain untuk memperoleh pinjaman juga agar barangnya itu aman dan terpelihara dengan baik. Sedangkan bagi *murtahin* akan membawa dampak bagi lembaganya atau dirinya sendiri, dimana si *rahin* sudah tidak percaya lagi untuk menitipkan barangnya ke rumah pegadaian atau *murtahin*.

Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.⁸

Oleh karena itu, untuk menghindari agar hal-hal di atas, maka sebaiknya barang jaminan yang bergerak berupa emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung resiko yang rusak, hilang atau berkurang nilainya.

⁸ M. Ali Hasan., *op.cit.*, h. 255.

C. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Membangun Ekonomi Syari'ah.

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syari'ah bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.⁹

Dalam perkembangannya, gadai syari'ah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu “*Mengatasi Masalah Sesuai Syari'ah*”. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

Dengan memahami konsep lembaga gadai syari'ah maka, setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syari'ah atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan hukum Islam. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syari'ah dilakukan dalam bentuk *Al-Qardhul Hasan*, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 117.

¹⁰ *Ibid.*

Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang.

Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syari'ah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk *Al-Qardhul Hasan* sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama dari pada memberikan *Infaq*.

Hal ini menurut Muhammad Akram Khan karena *infaq* menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. *Infaq* katanya diperluhkan dalam kasus-kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian *Al-Qardhul Hasan* adalah lembaga bersaudara dengan *infaq*.¹¹

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersil. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersil, maka biasanya kelengkapan gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 105.

piutang dengan gadai dalam bentuk *Al-Qardhul Hasan* atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *Mudharabah* dan lain-lain.

1. *Al-Qardhul Hasan*.

Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada *murtahin* (sebagai bagian dari pendapatan Pegadaian syari'ah), karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*. Di samping itu, Pegadaian syariah juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikannya.

Menurut Muhammad Akram Khan, bahwa pengeluaran akad *Al-Qardhul Hasan* itu dalam rangka memenuhi kewajiban moral dan tidak ada balasan untuk itu. Menolong orang miskin dan membutuhkan (*mustahiq*) menjadi sebuah nilai keutamaan dalam semua masyarakat baradab di seluruh sejarah kemanusiaan.¹²

2. *Mudharabah*.

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang

¹² Sasli Rais., *op.cit.*, h. 74.

diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.¹³

3. *Ba'i Muqayyadah*

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan

¹³ Zainuddin Ali., *op.cit.*, h. 87.

berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.¹⁴

4. *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.¹⁵

5. *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu, pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penerapan akad *musyarakah* (*partnership, project financing participation*), yang diakadkan adalah dana dan

¹⁴ *Ibid.*, h. 92

¹⁵ *Ibid.*, h. 97.

kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh para pihak.¹⁶

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi termasuk gadai. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi agar terhindar dari perbuatan riba. Karena akadlah yang menentukan transaksi itu menjadi sah atau tidak. Adapun prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suka sama suka.
- b. Tidak boleh menzalimi.
- c. Keterbukaan (transparasi).
- d. Penulisan.

Namun itu semua belum bisa berjalan sesuai syariat Islam kalau bangunan ekonomi Islam sendiri tidak diterapkan didalamnya. Karena nilai bangunan ekonomi Islam merupakan nilai universal dalam hukum Islam. Adapun nilai universal bangunan ekonomi Islam yaitu:

- a. Tauhid (keimanan).
- b. *'Adl* (keadilan).
- c. *Nubuwwah* (kenabian).

¹⁶ *Ibid.*, h. 101

d. Khilafah (kepemimpinan).

e. *Ma'had* (hasil).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gadai (*rahn*) itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syari'ah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam ada pada pemberi gadai (*ar-rahn*), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (*ar-rahn*) tersebut dalam hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.
2. Pandangan para ulama tentang barang gadai yang dimanfaatkan yaitu pada umumnya ulama membolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Gadai syari'ah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-sehari. Bahkan lebih jauh dari sistem ekonomi konvensional yang sangat berkembang pesat. Tetapi setidaknya ada usaha-usaha untuk menjalankan gadai syari'ah tersebut sebagai alternatif keluar dari masalah-masalah yang dialami masyarakat.

B. Saran-Saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam melakukan praktik gadai, haruslah tetap berada pada rambu-rambu syariat Islam.
2. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh seenaknya mengambil atau menarik manfaat terhadap barang gadai, melainkan harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik barang (*rahin*) karena bagaimanapun juga, dia masih mempunyai hak pada barang tersebut. Kemudian, *murtahin* tidak boleh terlalu berlebihan memanfaatkan barang gadai, karena mengandung resiko rusak, hilang dan berkurangnya nilai barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Bayan, *Shahih Bukhari dan Muslim*. Cet. I; Bandung: Jabal, 2008.

Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Fikr, 1983.

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* . Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Asy-Syaukani, *Nailal-Autyahr* Cet. IV; Beirut: Dahr al-Fkr. Hadist riwayat Asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syiahb dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gema Isani, 2005.

Erhans Anggawirya, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah Surabaya, 1995.

Firdaus, Muhammad dkk, *Mengatur Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan. M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Huda Nurul, Heykal Muhammad, *Lembaga keuangan Islam (Tinjauan Teoriris dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam (Analisis fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Taqiuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar*, Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995.

Ibn Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, Sunnan Ibn Majah, Dar Al-Fikr, 1995.

Muslim, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sarwat, Ahmad, *Hukum Menggarap Gadai Sawah*, Walau Setitik.
[http://Blogospot. Com](http://Blogospot.Com), 2011.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syafe'I. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet. VI; Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H.

Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. I; Surabaya: 1995.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. I; Bandung: CV.

Diponegoro, 1984.

Zuhdi, Masjfuk, *Musail Fiqiyah*, Cet. IV; Jakarta: CV. Haj, 1993.

Zuhri, Muhammad, dkk, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rustam akrab di sapa Tam lahir di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 1988 dari pasangan Ibrahim Mustafa dan Siti Aminah, anak ke-4 dari 8 bersaudara. Tahun 1995 masuk di sekolah dasar tepatnya SD Inpres Jongkoe, Kabupaten Manggarai Timur sampai kelas VI. Pada tahun 2001 diterima di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Reo, Kabupaten Manggarai Tengah, dan tamat tahun 2004. Kemudian mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri Reo, Kabupaten Manggarai Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2007 terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam. Tahun 2011 berhasil mendaftar gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) dengan hasil yang memuaskan.

Selama menjadi mahasiswa penulis sangat aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan. Baik organisasi intra maupun ekstra kampus.